

venny@uny.ac.id

Volume 1, Nomor 1. Februari 2012

ISSN 2089-7537

JURNAL IKADBUDI

JURNAL ILMIAH BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA DAERAH



PENERBIT
IKATAN DOSEN BUDAYA DAERAH SE-INDONESIA
BEKERJA SAMA DENGAN
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN REDAKSI.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN JAWA UNTUK MEMBANGUN KEHIDUPAN BANGSA	
<i>Darmoko</i>	1
AMEMANGUN KARYENAK TYASING SESAMA: WUJUD UNGGAH-UNGGUH BERBAHASA JAWA SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN WATAK BANGSA YANG TANGGUH	
<i>Suharti</i>	13
KESUSASTRAAN BALI DALAM MENJAWAB TANTANGAN GLOBAL	
<i>I Wayan Suardiana</i>	24
NILAI-NILAI LUHUR DALAM UNGKAPAN JAWA SEBAGAI FONDAMEN KEHIDUPAN MASYARAKAT BERBUDAYA	
<i>Endang Nurhayati</i>	43
ESTETIKA MUSIK DALAM OPERA RAJA BALI CHANDRA KIRANA KARYA VINCENT McDERMOTT	
<i>Kustap</i>	51
KONSEPSI "KESEMPURNAAN" HIDUP JAWA DALAM TEKS <i>SERAT PASTHIKAMAYA</i>	
<i>Hesti Mulyani</i>	64
PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH (SUNDA) MELALUI PEMBINAAN KEGIATAN APRESIASI BAHASA DAN SENI DI JAWA BARAT	
<i>Dinding Haerudin</i>	75
NILAI FILOSOFIS LAGU KARYA KI NARTASABDA DALAM PENTAS WAYANG PURWA	
<i>Purwadi</i>	82
ETIKA DAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA MAKASSAR MELALUI REFLEKSI BAHASA DALAM KONTEKS LOKAL-GLOBAL	
<i>Ery Iswary</i>	88
<i>SERAT NITIPRANA</i> SEBAGAI SUMBER KEARIFAN DALAM PEMBENTUKAN PEKERTI BANGSA	
<i>Nurhidayati</i>	96
ETNOPEDAGOGI DALAM KAULINAN DAN KAKAWIHAN BARUDAK SUNDA	
<i>Dede Kosasih</i>	109

**UPAYA MENGUNGKAP PERANAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI ACUAN
UNTUK PEMBENTUKAN PEKERTI BANGSA**
Siti Mulyani..... 119

ETIKA HUKUM JAWA
Prpto Yuwono 130

AJARAN BUDI PEKERTI DALAM RINGGIT PURWA
Afendy Widayat..... 141

**REAKSI SANG PUJANGGA TERHADAP PELANGGARAN ETIKA: Kritik
Sosial Yasadipura II dalam *Serat Wicara Keras***
Venny Indria Ekowati..... 152

**DINAMISASI BAHASA DAN BUDAYA JAWA: Mengelola Perubahan Bahasa
dan Budaya Jawa dalam Perspektif Sosio-Kultural**
Mulyana..... 163

**REAKSI SANG PUJANGGA TERHADAP PELANGGARAN ETIKA:
Kritik Sosial Yasadipura II dalam Serat Wicara Keras**

Venny Indria Ekowati
Universitas Negeri Yogyakarta
venny@uny.ac.id

Abstract

This article tells about creative process of Rangga Warsita tha related by social deviation. Raden Ngabehi Rangga Warsita is a popular writer in Surakarta Hadiningrat Palace. He has familiar slogan that called Jaman Edan which explain the situation of country is very chaos. Many people do dishonest and ungoods. Opportunity and authority is hold by bad leader. so, Raden Ngabehi Rangga Warsita try to give social critics by writing a literature.

Keyword: *Rangga Warsita, Surakarta Palace, Social critics*

PENDAHULUAN

Keadaan Kraton Surakarta yang tidak menentu pada masa pemerintahan Paku Buwana IV (PB IV), mampu menggerakkan intuisi seorang pujangga Jawa, yang dengan tegas dan terus-terang melontarkan kritik pedas terhadap keadaan sosial pada masa tersebut. Masa peralihan kekuasaan dari PB III kepada PB IV merupakan suatu situasi yang rawan. Menjelang 1755, pemberontakan Mangkubumi semakin mencemaskan Belanda. Bahkan Mangkubumi berani menyerang Belanda di daerah Pesisir. Akhirnya pada tanggal 17 Maret 1755 diadakan perundingan yang diprakarsai oleh Hartingh di sebuah desa yang bernama Giyanti.

Menurut Ricklefs (2000: 404-410), Yogyakarta dan Mangkunegaran sesudah Giyanti relatif aman dan stabil. Berbeda halnya dengan Surakarta. Krisis selalu terjadi di Surakarta dan Susuhunan yang berhati lembut tidak mampu mengendalikan intrik-intrik yang terjadi di keraton. Istrinya terlalu dominan. Namun lambat laun Paku Buwana III

berusaha untuk mengembalikan kewibawaannya sebagai raja dengan menceraikan istrinya pada tahun 1762. Namun hal ini tidak menyelesaikan masalah. Surakarta tetap menjadi kerajaan yang tidak stabil dan kurang aman, salah satu sebabnya karena adanya krisis kepemimpinan. Pada tahun 1787 situasi makin runyam di Surakarta. Seperti yang disampaikan oleh Ricklefs (2000: 472).

Situasi eksploratif yang terbentuk pada tahun 1788 di Surakarta, dengan kebencian terhadap Belanda kini makin gawat. Ditambah dengan besarnya pengaruh putra mahkota yang menyukai mistik dan membenci orang-orang Eropa. PB III semakin mendekati akhir hayatnya. Ketegangan mengiringi sukseksi membuat semakin panasnya situasi.

Pada tanggal 29 September 1788, putra mahkota Surakarta dilantik menjadi Susuhunan PB IV. Pakubuwana IV menunjukkan sangat taat dalam beragama dan membenci campur tangan Belanda terhadap pemerintahan Surakarta. Menganggap Belanda sebagai

orang kafir. Selain itu, raja muda ini juga berambisi untuk menyatukan kembali kerajaan yang terpecah di bawah kekuasaannya. Pakubuwana IV melakukan langkah-langkah yang meneguhkan. Yaitu memecat para pejabat yang berkedudukan tinggi kerajaan dan mengangkat penasihat-penasihat keagamaan di keraton. Orang-orang ini sering disebut sebagai pendeta *atau paepen*.

Pengaruh para pendeta ini sangat besar. Bahkan PB IV sangat percaya bahwa para pendeta ini mempunyai ilmu kesaktian, jimat, dan sihir yang mampu memuluskan cita-citanya yang terpendam. Bahkan pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh para *guru dalem* dianggap sebagai angin lalu dan sebagai sesuatu yang pasti termaafkan di mata sang raja. Mungkin raja dibutakan oleh bujuk rayu para *guru dalem*, tetapi tidak orang-orang di sekitarnya. Semua bangsawan, Belanda, bahkan rakyatnya menyadari akan kesalahan raja mereka. Namun hanya segelintir yang berani berbicara. Salah satunya ialah Yasadipura II yang dengan *Serat Wicara Keras*-nya secara khusus memprotes tingkah laku *para guru dalem* yang dianggapnya sudah melanggar etika.

PENGERTIAN ETIKA, ETIKET, DAN BUDAYA JAWA

Pada masa pemerintahan PB IV tersebut di atas, banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran etika yang menyebabkan keadaan Surakarta semakin tidak kondusif. Mulai dari pelanggaran etika kepemimpinan oleh PB IV sendiri, patih-patihnya, dan terutama para pena-

sehat yang disebut sebagai *guru dalem*. Pelanggaran etika juga banyak dilakukan oleh masyarakat dan kaum bangsawan kraton. Karena makalah ini membicarakan tentang etika, maka perlu diberikan sedikit pengertian mengenai etika dan etika Jawa. Etika secara etimologis berasal dari dua kata yaitu *ethos* dan *mores*, seperti dalam kutipan berikut.

The word "ethics" is derived from the Greek word ethos (character), and from the Latin word mores (customs). Together, they combine to define how individuals choose to interact with one another. In philosophy, ethics defines what is good for the individual and for society and establishes the nature of duties that people owe themselves and one another. Though law often embodies ethical principals, law and ethics are far from co-extensive. Many acts that would be widely condemned as unethical are not prohibited by law -- lying or betraying the confidence of a friend, for example. And the contrary is true as well. In much that the law does it is not simply codifying ethical norms (Cornell, 2009).

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya etika ialah cara yang mengatur seseorang untuk berinteraksi dengan sesamanya. Untuk menjadikan sesuatu baik bagi dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya. Namun etika tidak sama persis dengan hukum. Hukum sangat mengikat dengan sanksi-sanksi yang jelas, sedangkan pelanggaran etika biasanya diikuti dengan sanksi moral bagi orang yang melanggarnya.

Prasetyo (2009) juga menyatakan bahwa etika merupakan pedoman sikap yang membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tindakan manusia selalu lahir dari keputusan pribadi yang bebas dengan selalu bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindakannya itu, karena memang ada alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang kuat mengapa ia bertindak begitu. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalankan hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup.

Budaya dan etika merupakan dua hal yang saling kait-mengkait. Etika merupakan bagian daripada wujud kebudayaan yang pertama. Yaitu kompleks daripada ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan sebagainya yang hidup dalam masyarakat Jawa dan merupakan cerminan masyarakat Jawa sebagai pemangku budaya tersebut.

Etika dan etiket merupakan dua hal yang berbeda. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan rangka yang mendasari atau melandasi etiket. Seperti yang disampaikan oleh Bertens (1999:9), yang menyebutkan paling tidak ada empat perbedaan antara etika dan etiket.

1. Etika menyangkut perbuatan yang menjadi pedoman manusia untuk menjalani kehidupan yang baik dan tepat sesuai dengan cara hidup yang telah ditentukan oleh komunitasnya. Etika me-

nyangkut perbuatan baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan mana-mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan.

2. Etiket hanya berlaku jika seseorang berhubungan dengan orang lain. Jika tidak ada pihak kedua yang hadir, maka etiket tidak berlaku. Sedangkan etika selalu mengikuti dan selalu berlaku dalam kehidupan manusia. Misalnya etiket makan. Jika makan di tempat umum, mestilah dengan cara yang sopan. Jika makan sambil mengangkat kaki di warung makan boleh dikatakan melanggar etiket. Tetapi etiket ini tidak berlaku lagi jika dia sendirian makan di dalam kamar dan tidak ada orang lain di sana. Sedangkan etika selalu berlaku di manapun dan kapan pun. Misalnya larangan untuk mencuri, membunuh, dan yang lainnya.
3. Etiket bersifat relatif, yang dianggap tidak melanggar etiket boleh dianggap melanggar etiket jika berada dalam suatu komunitas yang berbeda.
4. Etiket memandang manusia dari segi lahiriah, sedang etika menyangkut manusia dari segi batiniah.

Etiket menurut Soeratman (1989: 1) disamakan dengan etiket. Secara singkat etiket dapat dikatakan sebagai sikap bergaul yang baik misalnya cara berbicara, cara makan, cara berjalan, cara menerima tamu, dan sebagainya. *Wicara Keras* sendiri lebih banyak mengandung etika, namun pada bagian tertentu juga mengandung etiket.

KRITIK SOSIAL

Penyimpangan etika yang terjadi pada golongan kraton secara khusus, dan masyarakat Surakarta

pada umumnya dituangkan dalam *Wicara Keras*. Karena *Wicara Keras* merupakan bentuk ekspresi kemarahan Yasadipura II terhadap penyimpangan-penyimpangan etika yang terjadi di masyarakat. *Wicara Keras* secara umum juga menyimpang daripada konsepsi yang berlaku dalam masyarakat Jawa. Kritik oleh masyarakat Jawa sering dianggap sebagai sesuatu yang membuat keadaan akan lebih buruk. Pemberlakuan konsep *njaga praja* oleh masyarakat Jawa juga merupakan mekanisme kontrol agar seseorang raja atau pejabat kerajaan tetap nampak berwibawa walaupun sebenarnya keropos. Bahkan oleh masyarakat Jawa kritik secara terang-terangan dianggap vulgar dan kasar sehingga menyakitkan hati. Ungkapan yang cukup terkenal dalam masyarakat Jawa ialah *dhupak bujang, esem mantri, semu bupati* 'tendang petani, senyum menteri, semu bupati' (Purnomo, 2008).

Ungkapan di atas mengandung arti bahwa kritik keras hanya boleh dilontarkan kepada golongan bawah. Jika masyarakat golongan rendah seperti petani dan buruh, boleh dikritik secara langsung bahkan melalui kekerasan fisik seperti ditendang. Kritik untuk golongan yang lebih atas, yaitu menteri tidak boleh dilakukan secara vulgar dan dengan kekerasan fisik, cukup dengan senyum. Sedangkan untuk golongan bupati, yang berada di atas menteri tidak boleh dikritik secara keras, hanya dengan perlambang saja. Yasadipura II berani mendobrak konsepsi ini dan melon-

tarkan kritik keras kepada para bupati, patih, bahkan raja.

Tulisan Yasadipura memang mempunyai ciri khas tersendiri. Kebanyakan tulisannya mengandung kritikan dan kecaman terhadap situasi politik intern Keraton Surakarta yang timpang. Oleh karenanya, naskah ini memiliki nilai cipta tinggi sekaligus dapat dijadikan sumber sejarah yang menggambarkan keadaan dan sikap sosial politik pada masa naskah tersebut ditulis (Yahya, 2005). Keberanian Yasadipura II dalam mengkritik para bangsawan, bupati, patih, dan rajanya secara keras dan terus terang merupakan sesuatu fenomena yang menarik dan penting untuk dikaji. Selain itu juga latar belakang yang mendasari Yasadipura II melontarkan kritik tersebut.

KRITIK SOSIAL YASADIPURA II DALAM SERAT WICARA KERAS

Serat Wicara Keras merupakan wujud reaksi Yasadipura II terhadap keadaan kota Surakarta yang carut-marut. Salah satu sebab terjadinya kekacauan ialah adanya pelanggaran etika yang terjadi di keraton Surakarta. Kritik sosial tersebut salah satunya dilancarkan Yasadipura II kepada PB IV seperti dalam kutipan berikut:

Sinom bait 6:

Aja dumeh yen awirya, anak putune wong mukti, senadyan mengku negara, aja sumangkeyan edir, tan nganggo dugi-dugi, sapa sira sapa ingsun, pan iku bebakalan, atombok kaki lan nini, kang wus becik panggonane melu kambah

'jangan mentang-mentang keturunan raja, anak cucu orang yang berhasil, walaupun anak pemimpin negara, jangan semena-mena dan sombong, mengandalkan kekuasaan, itulah yang menjadi sebab, seseorang mengorbankan nenek moyangnya yang sudah tenang, ikut terseret-seret namanya'.

Kutipan di atas memberikan sindiran kepada PB IV yang bersikap sewenang-wenang. Yasadipura II menekankan bahwa seorang pemimpin, walaupun dia adalah raja, tidak boleh bersikap sewenang-wenang. Karena sikapnya tersebut dapat menyengsarakan rakyat dan mencoreng nama baik keluarganya. PB IV sering mengambil keputusan sepihak yang dianggap tergesa-gesa dan hanya mempertimbangkan ambisi dan sikap yang emosional.

Pada masa pemerintahan Raffles, terdapat peraturan yang dianggap merendahkan dan merubah etiket yang selama ini sudah dilaksanakan ialah larangan Daendels kepada para *ministers* untuk membuka topi jika menghormat kepada Sunan maupun Sultan. Peraturan-peraturan yang merendahkan derajat para raja Jawa ini menimbulkan kebencian Sultan dan Susuhunan. Sehingga pada masa pemerintahan Raffles, Sultan Sepuh dibuang ke pulau Pinang. Pakubuwana IV kemudian menukar sebagian daerahnya yang berada di *mancanegara* dan *negaragung* demi kelangsungan tahtanya. Hal ini didasarkan pada perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1811

dan diperbaharui pada 1 Ogos 1812 (Filet dalam Darsiti, 1989: 30).

Selain pengambilan keputusan yang tidak tepat seperti di atas, sikap ambisius dan tergesa-gesa yang dilakukan oleh PB IV yang seharusnya tidak dilakukan ialah peran serta PB IV dapat pemberontakan Sepoy tahun 1815. Sunan PB IV memang masih selalu menyimpan angan-angan untuk menyatukan Mataram di bawah kekuasaannya. Oleh karena itu beliau selalu menggunakan setiap kesempatan untuk melancarkan intrik demi mencapai tujuannya. Pakubuwana IV mempunyai hubungan erat dengan orang-orang Sepoy. Bahkan Sunan juga memberikan bantuan 400 orang pasukan serta uang 4000 dollar Spanyol untuk menyuap orang-orang Spanyol yang ada di Jawa Tengah agar melawan penguasaan Inggeris di Yogyakarta. Sunan berharap jika konspirasi ini berhasil, maka beliau akan menguasai kendali atas Yogyakarta dan akan memperoleh kembali daerah Kedu yang kaya, yang dikuasai Inggeris pada tahun 1789 (Carey, 1985:110-111).

Pakubuwana IV selalu memainkan peranan di balik layar untuk mencapai ambisinya. Namun jika ambisinya tidak sukses, Sunan tidak akan segan menyerahkan orang-orang yang dekat dengannya. Pada peristiwa Pakepung, Sunan tanpa ragu-ragu menyerahkan para penasihat terkasihnya kepada Belanda untuk diasingkan. Kemudian saat pemberontakan Sepoy tidak berhasil, tanpa ragu Sunan juga menyerahkan adik laki-lakinya demi menyelamatkan kedudukannya. Intrik

Sepoy merupakan intrik politik terakhir sampai dengan tahun 1820 atau sampai meninggalnya PB IV. Sampai akhir hayatnya Belanda semakin memperkuat posisinya. Raja Surakarta tidak lebih daripada boneka, karena tidak bisa membuat keputusan penting apapun tanpa persetujuan daripada residen Belanda.

Selain pelanggaran etika yang tersebut di atas, kebijakan Pb IV ada pula yang dianggap melanggar etika, khususnya etika kepemimpinan. *Negara Kertagama* menyebut konsep kepemimpinan ideal dengan istilah *Catur Praja Wicaksana* (Widyawati, 2007: 37-46). Salah satunya ialah *beda* yang berarti 'adil dan tidak membedakan rakyat'. Raja dalam hal ini melanggar etika kepemimpinan yaitu dengan tidak bersikap adil. Pada awal tahun 1789, raja mengangkat para penasehat baru dari golongan santri tanpa proses yang sesuai dengan ketentuan pengangkatan pejabat kerajaan pada masa tersebut.

Untuk masuk dalam susunan masyarakat priyayi, diperlukan proses yang cukup panjang. Jika *priyayi cilik* atau rakyat kecil akan masuk ke golongan priyayi, mereka diharuskan melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut ialah *suwita*, *magang*, dan *wisuda*. Masa *suwita* (mengabdikan) untuk mengetahui kepribadian (ketekunan, kerajinan, kesetiaan, dan kejujuran) seorang calon priyayi. *Magang* dipakai untuk mendidik kemampuan profesional seorang calon. Kemudian dilakukan wisuda. Wisuda untuk patih dilakukan langsung oleh raja, sedangkan wisuda untuk *abdi dalem* priyayi

yang lain dilakukan oleh patih sekalipun diangkat oleh raja (Soeratman, 1989: 357). Untuk rakyat kecil yang tidak mempunyai keturunan bangsawan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan *abdi dalem*, proses *suwita*, *magang*, dan *wisuda* ini biasanya akan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, untuk golongan rakyat kecil, proses *suwita* juga sukar karena belum tentu setiap keluarga priyayi mahu menerima seorang anak dari golongan rakyat kecil untuk *suwita*.

Namun kebiasaan yang sudah berlaku lama tersebut dilanggar oleh PB IV dengan mengangkat enam orang dari kalangan santri yang disebut dengan *guru dalem*. Enam orang ini langsung memperoleh kedudukan tinggi di pemerintahan, karena diangkat langsung oleh raja. Bukan karena jasanya, tetapi karena kepandaian mereka dalam berkata-kata sehingga mampu merebut hati raja. Tanpa proses *suwita*, *magang*, dan *wisuda*, enam guru dalem ini langsung menempati posisi di atas sebagai penasehat raja dan mendapat berbagai keistimewaan.

Yasadipura II juga memprotes hal ini dengan menyebut bahwa para *guru dalem* tersebut *lali kelamun wong cilik arep ngowahi adat*. Lengkapnya tertulis dalam bait berikut.

Sinom, bait 24:

Kaya alamira Digda, lali kelamun wong cilik, arep ngowahi adat, ambubrah janji wus dadi, amempeng kudu jurit, sumbare bisa mabur ...'

seperti yang dilakukan oleh Digda (Wiradigda), lupa kala ia hanyalah orang kecil, akan mengu-

bah adat kebiasaan, merusak janji yang sudah ditetapkan, selalu saja berhasrat untuk berperang, mengaku bisa terbang ...'

Para *guru dalem* ini sudah melewati batas otoritasnya. Fungsinya tidak lagi dalam urusan keagamaan, melainkan politik. Para bangsawan dan pejabat tinggi kerajaan tergeser fungsi dan kedudukannya oleh para *guru dalem*. Bahkan para *guru dalem* ini memperoleh otoritas khusus untuk campur tangan dalam urusan-urusan kenegaraan. Yasadipura II dalam *Wicara Keras* menyebut bahwa enam orang *guru dalem* lupa kepada asal-usulnya, bersikap sombong dan sewenang-wenang, terutama kepada rak-yat kecil.

Yasadipura II juga menyatakan bahwa para *guru dalem* ini *ambubrah janji wus dadi*. Makna *janji wus dadi* yaitu perjanjian yang dilakukan oleh Belanda, Kraton Yogyakarta, dan Kraton Surakarta tentang pembagian kekuasaan yang tertuang dalam perjanjian Giyanti. Selain itu juga perjanjian yang dilakukan untuk meredam pemberontakan Mas Said pada tanggal 17 Maret 1757. Perjanjian tersebut menyepakati bahwa Susuhunan harus menyerahkan 4000 cacah dari seluruh daerah kekuasaannya kepada Mas Said. Hampir separuh wilayah Surakarta berpindah tangan. Namun Mangkunegara tidak berhak menyanggah gelar sunan atau sultan, namun hanya berhak menggunakan gelar Kanjeng Gusti Arya Adipati (KGPAA) Mangkunegara I (Revolta, 2008: 138).

Ambubrah janji wus dadi merupakan protes Yasadipura II karena para *guru dalem* ini menghasut PB IV untuk membatalkan perjanjian Giyanti dan perjanjian dengan Mas Said. Para *guru dalem* berhasil meyakinkan PB IV bahwa mereka sanggup untuk menyatukan kembali Mataram di bawah kekuasaan PB IV dan mengusi Belanda. Peristiwa ini kemudian memicu peristiwa *Pakepung* yaitu pengepungan Surakarta oleh tentara Yogyakarta, Belanda, dan Mangku-negaran dengan maksud memaksa PB IV untuk menyerahkan para *guru dalem*.

Enam *guru dalem* yang diangkat secara sepihak oleh Pb IV ialah Wiradigda, Panengah, Ahmad Saleh, Bahman, Martajaya, dan Sujanapura. Enam orang ini merupakan penasehat kepercayaan PB IV. Mereka mengaku para agamawan Islam, namun masih percaya pada jimat-jimat, kesaktian, sihir, mengunjungi makam keramat, bahkan masih melakukan hal-hal yang dianggap haram oleh agama Islam. Selain itu, fungsi para penasehat ini lebih mengarah kepada urusan politik dibandingkan dengan keagamaan. Bahkan mereka menggeser kedudukan para pejabat tinggi di lingkungan keraton Surakarta. Namun PB IV tetap menaruh kepercayaan penuh kepada mereka. Sebenarnya sikap ini merupakan pelarian tersembunyi PB IV karena setelah kematian permaisurinya, jiwanya menjadi labil dan mudah terpengaruh.

Disebutkan pula dalam *Wicara Keras*, bahwa para *guru dalem* ini berani berhutang dengan menga-

tasnamakan raja. Seperti dalam kutipan berikut:

Pupuh V: Kinanthi, pada 9-13

9. *aja ana melu-melu, ingsun tenunge kang wlandi, kurang sathithik lir alam, panengah wiradigda nir, wasananira anglempara, mung cariwis jaluk dhuwit.* 10. *amathentheng rada gemblung, gunane ngapus-apusi, ngempiang sakeh dedagangan, wong ngendi ya ingkang prapti, sakeh barange den utang, dhuwite den semayani* 11. *besuk yen ingong lumebu, mung kurang sepuluh wengi, dhapet uang sangking Sunan, kanjeng ratu ingkang kasih, sun anyuwuna piraa, pan sewu leksa pinaring.* 12. *sun bayarken sira tamtu, wus ngandel pra dagang mulih, dedagangan tinilar, kadya wong ngurugurugi, muwuhi ingkang jarahan, tekan janji pating cili.* 13. *endi mau-endi mau, priye-priye awak mami, sinerek utang piutang, mungguhing wicara iki, iya marang ing negara, ana siji kang nahuri*

Berdasarkan kutipan di atas, Yasadipura II menyatakan bahwa para *guru dalem* ini disebut sebagai orang gila yang suka menipu, culas, dan menggunakan nama Sunan untuk berhutang. Para *guru dalem* ini berani memberi jaminan bahwa berapapun yang akan mereka minta, pasti dikabulkan oleh Sunan. Akhirnya sampai pada hari yang dijanjikan, para *guru dalem* ini tidak kunjung membayar hutang mereka.

Selain disebut dalam *Wicara Keras, Serat Babad Mangkubumi* juga sependapat dengan Yasadipura II tentang kelakuan para *guru dalem* yang tidak bertanggung jawab.

Babad Mangkubumi pada pupuh LXXV (*Dhandhanggula*) menyebut pula fakta mengenai para *guru dalem*, seperti di bawah ini.

1. *Sampun angsal kalih warsa nguni jumenenge Sunan Surakarta ywanten pangridhu belise tur ing wong corah wau Pangran Mangkunegara kait kaliyan Kangjeng Sunan sangking aturipun Wiradigda lan panengah Ahmad Saleh bahman kandhuwuran maning aran sujanapura*
2. *Lan Martajaya iku araning Rembug ngrayud nagri Ngayoga saguh nyirnakaken Welonda Anjabela kang negari pasisir miwah Ngayogya* (Ricklefs, M. C., 2002: 536-537).

Berdasarkan nukilan di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah dua tahun masa kepemimpinan PB IV, Sunan terpengaruh oleh iblis yang bernama Wiradigda, Pane-ngah, Ahmad Saleh, Bahman, Martajaya, dan Sujanapura. Enam orang ini merupakan penasehat kepercayaan PB IV. Dijelaskan dalam *Babad Mangkubumi* bahwa para *guru dalem* ini tidak hanya berjanji untuk menyatukan Mataram, tetapi juga mengusir Belanda dari tanah Jawa. Para *guru dalem* sangat membenci orang Belanda, karena menurut mereka Belanda tidak lebih daripada kumpulan orang-orang kafir yang harus dimusnahkan. Hal ini semakin membuat keadaan tidak kondusif, karena pada masa tersebut tersiar kabar bahwa para *guru dalem* dan PB IV akan melakukan

pembantaian masal terhadap Belanda.

Kritik lain yang dilancarkan oleh Yasadipura II dapat dilihat pada kutipan berikut.

Sinom, bait 17:

*Lamun nora mangkono wa, pes-
thi liniron ing iblis, duk ibune pu-
lang raras, lawan bapakne nguni,
setan ingkang ngemori, yen nora
iku blek thungul, mulane karem
sasar, belangsar ra dhemen tha-
lit, sesetanan anjaili padha bang-
sa.*

‘jika tidak seperti itu, pasti tertukar oleh iblis, ketika ibunya berhubungan suami istri dengan suaminya, ada setan yang ikut serta, dan tiba-tiba datang, oleh karena itu anak yang lahir dari hubungan tersebut sering menyimpang dari kebenaran, berhati-jahat seperti setan, suka berbuat jahat kepada orang-orang sebangsanya’.

Kritikan di atas merupakan ekspresi kemarahan Yasadipura II. Sampai-sampai pujangga ini mengatakan bahwa sebagian orang yang hidup di sekitar masa *Wicara Keras* ini ditulis, dianggap bermoral bejat. Yasadipura II mengatakan bahwa orang-orang ini lahir dengan iblis di dalam tubuhnya. Pada saat ayah ibunya melakukan hubungan suami istri, iblis ikut serta. Oleh karena itu, bayi yang lahir dari hubungan ini menjadi orang-orang yang bejat, suka dipuji, suka berbuat onar, berani sesumbar tetapi tidak ada buktinya.

Kritikan Yasadipura II ini pada dasarnya juga merupakan bentuk keprihatinan terhadap luntarnya eti-

ka pokok orang Jawa yaitu kerukunan. Menurut Geertz dalam Suseno (2001: 38), terdapat dua kaidah dasar kehidupan masyarakat Jawa dengan etika Jawanya, yaitu prinsip rukun dan hormat. Rukun bukan berarti menciptakan keselarasan sosial yang baharu, tetapi berusaha untuk mempertahankan keselarasan yang sudah ada. Prinsip kerukunan pada masa *Serat Wicara Keras* ini sudah mulai luntur dalam kehidupan masyarakat Jawa terutama di kalangan keraton yang penuh dengan intrik.

Krisis moral yang melanda para bangsawan kerajaan utamanya kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta penyalah-gunaan jabatan. Gaya hidup mewah dan kebarat-baratan, sehingga banyak bangsawan yang terjerat hutang. Baik untuk melegitimasi kebangsawan-an mereka maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup mewah. Kurangnya kesadaran moral para bangsawan juga menyebabkan adanya intrik-intrik internal dalam kraton. Para pangeran melancarkan intrik untuk memperluas tanah *apanage* mereka sehingga para bangsawan berusaha untuk saling menjatuhkan. Secara khusus, *Wicara Keras* juga mengkritik sekaligus memuji para patih dalam beberapa pemerintahan. Para patih yang kinerjanya bagus mendapat pujian, sedangkan patih yang buruk kinerjanya mendapatkan kritik pedas.

Krisis moral juga melanda masyarakat Surakarta. Sehingga Yasadipura II menuliskan bait sebagai berikut dalam *Wicara Keras*.

Asmaradana, bait 20

Anggere slamet wong urip, tumindak lawan panarima, tan kurang sandhang pangane, aja sok anguja hawa, anuntun kaluputan, dadi nistha temahipun, duraking ngakir ira.

Bait di atas merupakan teguran kepada masyarakat Surakarta yang pada waktu itu yang banyak melanggar etika. Para penduduk banyak yang mengalami krisis moral seperti *malima* yaitu *main* 'berjudi', *madon* 'bermain perempuan', *maling* 'mencuri', *mendem* 'mabuk minuman keras', dan *madat* 'ketagihan narkoba'. Hal ini sesuai dengan pendapat Menurut Carey (1986: 45-54), yang menyatakan bahwa sekitar tahun 1813 tanah-tanah para bangsawan bahkan sampai tanah-tanah pedesaan disewakan kepada orang-orang Eropa dan Cina.

Penduduk yang tinggal di atas tanah yang disewakan tersebut juga bekerja kepada bangsa Eropa maupun Cina sebagai buruh-gajian. Pembagian tanah persewaan yang kurang teratur sering menimbulkan kekecohan dan serangan terhadap suatu perkebunan. Sistem pajak yang diterapkan oleh Raffles semakin membuat rakyat menderita karena dilaksanakan secara tidak adil dan sudah dinaikkan secara sewenang-wenang. Biasanya para petani meminjam uang dari orang-orang Cina yang kemudian ditukar dengan semua hasil panen mereka. Di sisi lain, para bangsawan juga masih menuntut pajak tanah daripada para petani. Hampir tidak pernah ada sisa panen dan para petani hanya makan seadanya. Biasanya jagung sebagai makanan pokok. Korupsi

juga dilakukan oleh para ketua pengumpulan pajak, selain korupsi para pemimpin pengumpulan pajak ini juga sering menyalahgunakan kedudukan mereka.

Para petani yang masih memiliki sisa hasil panen juga kesulitan untuk mem-bawa dagangannya ke pasar. Mereka diharuskan membayar cukai gerbang tol dengan tidak wajar. Bahkan para petani harus berkali-kali membayar cukai kepada bandar-bandar Cina yang mengambil keuntungan untuk diri mereka sendiri. Perjudian dan perdagangan candu tumbuh subur utamanya di Yogyakarta dan Surakarta. Usaha yang tumbuh subur di kota-kota kraton ini dikelola oleh para bandar Cina dan mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Bahkan dilaporkan oleh Crawford bahwa segerombolan buruh angkut, begitu menerima bayaran pasti akan dihabiskan di meja judi. Bahkan karena begitu miskinnya para buruh angkut ini sering berkeliaran dalam keadaan yang hampir bugil. Pada tahun 1816, budaya Eropa juga semakin mempengaruhi kehidupan masyarakat Jawa, terutama para bangsawan. Rumah-rumah dilengkapi dengan barangan-barangan gaya Belanda. Para bangsawan juga sering menyelenggarakan pesta dan bermabuk-mabukan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Serat Wicara Keras* merupakan ungkapan kemarahan Yasa-dipura II terhadap keadaan Surakarta pada masa pemerintahan PB IV. Kemarahan Yasa-dipura II disebabkan adanya pe-

langgaran-pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh raja, bangsawan keraton, maupun masyarakat pada umumnya.

Teks tersebut secara khusus menyebutkan nama santri-santri ke-sayangan Paku Buwana IV yang meng-hasut beliau dengan meng-atasnamakan agama dan berjanji untuk mengembalikan derajat Mata-ram dengan cara memper-satukan-nya kembali di bawah kuasa PB IV. Menurut catatan sejarah, peristiwa ini menimbulkan gejala di Surakarta yang akhirnya menorehkan seja-rah dengan nama peristiwa *Pake-pung*. Peristiwa pada saat Surakarta dikepung oleh Belanda, Mangkune-garan, Yogyakarta, dan Paku-alam-an dengan tujuan memaksa Paku Buwana IV untuk menyerahkan empat orang santri yang diduga sebagai penghasut raja. Teks ini secara khusus dapat dipakai untuk melacak kondisi sosial kemasyarakatan pada masa pemerintah-an PB IV. Teks *Wicara Keras* merupakan wujud pengendalian atau kontrol seorang pujangga terhadap penyimpangan-pe-nyimpangan etika yang berlaku di Sura-karta dengan tujuan agar peristiwa-peristiwa yang sudah ter-jadi dapat dijadi-kan pelajaran untuk generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- “*Ethics*” diakses dari <http://topics.law.cornell.edu/wex/ethics> diakses pada 31 Maret 2009.
- Adi Prasetyo, Djoko. 2009. “Cermi-nan Etika dalam Hubungan An-tar-Manusia: Analisis pada Be-berapa Ornamen Candi Suku” diakses dari www.journal.unair.ac.id pada 31 Maret 2009.
- Betrenz, K. 1999. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Carey, Peter. 1985. *Asal-usul Pe-rang Jawa, Pemberontakan Sepoy dan Lukisan Raden Sa-leh*. Terj. Pustaka Ahed. Jakar-ta: Pustaka Ahed.
- Purnomo, Sucipto Hadi. 2006. “Mengkritik Jawa, Kenapa Ti-dak?” diakses dari <http://kejawen.suaramerdeka.com> diakses pada 5 Januari 2009.
- Revolta, Raka. 2008. *Konflik Berda-rah di Tanah Jawa: Kisah Para Pemberontak Jawa*. Yogyakarta: Bio Pustaka.
- Ricklefs, M. C. terj. Alkhatab, Se-tiyawati dan Hadikusumo, Har-tono. 2002. *Yogyakarta di Ba-wah Sultan Mangkubumi 1749-1792: Sejarah Pembagian Ja-wa*. Yogyakarta: Matabangsa.
- Soeratman, Darsiti. 1989. *Kehidu-pan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta: Taman Siswa.
- Supriadi. 2001. *Kyai dan Priyayi di Masa Transisi*. Surakarta: Ya-yasan Pustaka Cakra.
- Suryadinata, Leo. 2003. “Etnik Tionghoa, Pribumi Indonesia dan Kemajemukan: Peran Ne-gara, Sejarah, dan Budaya da-lam Hubungan Antaretnis” di-akses dari iccsq.wordpress.com pada 27 November 2007.
- Yahya, Roby Muhamad. 2007. “Ra-den Ngabehi Yasadipura II” di-akses dari <http://neoroby.blogspot.com> di-akses pada 5 Januari 2009.